

Capim KPK "Lesu Darah"?

Komisi III DPR mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap sepuluh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai Senin (14/12) siang. Pada hari pertama dijadwalkan empat capim KPK menjalani *fit and proper test*, dan sisanya akan dilanjutkan Selasa (15/12).

Seleksi tahap akhir capim KPK kali ini agak berbeda dengan periode sebelumnya. Kali ini proses seleksi dibayangi rencana revisi UU 30/2002 tentang KPK yang merupakan usul inisiatif DPR. Menurut sumber SP di Jakarta, Senin (14/12) pagi, rencana revisi UU KPK membuat sejumlah capim tak lagi bersemangat. Sebab, mereka merasa percuma memiliki visi-misi yang luar biasa, jika kelak kewenangan KPK tetap akan dibonsai.

"Bagaimana mau bersemangat kalau UU KPK tetap direvisi. Rencana revisi itu jelas memangkas wewenang KPK," ujar sumber itu.

Setelah revisi UU KPK, lanjutnya, lembaga antikorupsi kelak bukan lagi sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Namun, KPK akan menjadi lembaga yang tugasnya fokus pada pencegahan saja.

Bila wewenang KPK hanya difokuskan ke pencegahan, kata dia, sama saja lembaga yang kredibilitasnya dipercaya rakyat itu hanya akan menjadi lembaga "macan ompong". Kondisi itu akan bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di negeri ini.

"Kalau revisi UU KPK jadi inisiatif DPR saya kira

Rumor Politik

sudah jelas arahnya yakni bagaimana melemahkan lembaga antirasuah itu.

Kalau menguatkan saya rasa *enggak* mungkin. Buat apa DPR capek-capek kerja kalau untuk menguatkan lembaga KPK. Kalau kebalikannya, iya," katanya.

Atas kekhawatiran itulah, sambung dia, sejumlah capim KPK yang memiliki tekad kuat untuk memberantas korupsi, kini menjadi kurang bergairah untuk menjalani *fit and proper test*. Di sisi lain, ada sejumlah capim malah mendukung rencana revisi UU KPK.

Dalam *fit and proper test* kali ini, ada dua kelompok capim. Kelompok pertama adalah delapan capim hasil yang lolos seleksi Panitia Seleksi (Pansel) pada tahun ini. Mereka adalah, staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang; dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta Surya Candra, dan hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata.

Selain itu, Brigjen (Pol) Basariah Panjaitan, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi Supto Pribowo, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.

Kelompok kedua adalah dua capim KPK hasil seleksi pada tahun lalu. Keduanya adalah Busyro Muqoddas dan Robby Brata. [H-14]



Sidang MKD Tak Perlu Diperpanjang Kasus "Papa Minta Saham" Kuras Energi Bangsa

[JAKARTA] Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tak perlu memperpanjang pembahasan masalah etika pada kasus "Papa Minta Saham", seperti yang dilaporkan lewat rekaman oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Pelanggaran etika oleh Setya Novanto sudah terang benderang dan konsekuensinya hanya satu, yakni pengunduran diri dari posisi sebagai ketua DPR. MKD harus segera memutuskan nasib Novanto agar tidak menguras terlalu banyak energi bangsa.

Pemanggilan Menko Pulhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan pengusaha Muhammad Riza Chalid hari ini tak perlu diikuti oleh penjemputan paksa jika mereka berhalangan hadir. Jika ada indikasi pidana, MKD bisa segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, Polri, atau Kejaksaan.

Demikian rangkuman pendapat peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, pakar hukum Frans Hendra Winarta, Ketua DPP PAN Teguh Juwarno, anggota DPR dari Fraksi PKB Danil Johan, dan anggota Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro yang dihimpun SP di Jakarta, Senin (14/12).

Siti Zuhro berpendapat, kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid harus segera berujung. Dia berharap MKD segera memutuskan dugaan pelanggaran etika Novanto.

"Kasus ini telah menyita perhatian kita dan telah menimbulkan kegaduhan di bangsa ini. Makanya, kasus 'Papa Minta Saham' harus segera diputuskan dan MKD harus memutuskannya secara independen dan berintegritas," ujar Siti.

Dia menilai, kasus ini telah mengganggu kinerja pemerintah dan parlemen. Jika parlemen gaduh, maka pemerintah tidak dapat bekerja dengan baik. "Sistem pemerintahan kita memang presidensial, tetapi ada mekanisme *checks and balances* yang dilakukan DPR. Jadi, perlu ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR untuk saling mendukung dalam menjalankan



Siti Zuhro



Frans Hendra Winarta



Teguh Juwarno

FOTO-FOTO: DOK SP

program-program kesejahteraan rakyat," katanya.

Jika pemerintah dan DPR saling "mengganggu", maka program-program kerja akan sulit terwujud, sehingga kepentingan rakyat diabaikan. Menurut Siti, dalam sidang etik di MKD sudah terlihat aksi saling mengunci antara pemerintah dan parlemen. "Karena itu, sekali lagi, saya minta segera tuntaskan saja sidang etik Novanto ini agar pemerintah kembali fokus bekerja dan DPR kembali melakukan pengawasan konstruktif terhadap roda pemerintahan," kata dia.

Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar menambahkan, pemeriksaan MKD terhadap pengusaha minyak M Riza Chalid dan Menko Pulhukam Luhut Panjaitan tidak mendesak. Pasalnya, kata dia, pertemuan antara Novanto, Riza, dan Maroef telah terjadi dan tiga orang itu telah mengakuinya.

"Ketika Novanto mengonfirmasi adanya pertemuan itu, dalam konteks etik yang sedang berlangsung, ada atau tidak Riza Chalid dalam persidangan tidak menutup fakta kalau telah terjadi pertemuan dan percakapan. MKD tetap bisa mengambil putusan terkait dugaan etik yang terjadi," kata Erwin.

Menurutnya, kehadiran Riza memang penting selaku saksi kunci. Namun, kalau pengusaha minyak itu tidak hadir, bukan alasan membuat pemeriksaan etik terhadap Novanto berjalan lambat dan terkesan kehilangan arah.

Sedangkan, keterangan Luhut, ujarnya, tidak relevan untuk menjelaskan rangkaian peristiwa pertemuan. MKD bisa menggunakannya sebagai keterangan tambahan yang sesungguhnya tak terlalu penting untuk pembuktian teradu.

Erwin berpandangan, MKD sudah tidak fokus membuktikan adanya perbuatan tidak patut yang dilaku-

kan Novanto dengan mengajak pengusaha bertemu Presdir Freeport. Padahal, secara jernih, hal tersebut telah terungkap dan MKD tinggal memutuskan saja tanpa perlu mengulur waktu.

Pakar hukum Frans Hendra Winarta menilai, kinerja MKD sudah tak bisa diharapkan terkait proses pembuktian pelanggaran etika Novanto. Untuk itu, dia berharap Kejaksaan harus serius mengusut kasus tersebut.

"Penegakkan hukum tidak perlu menunggu putusan MKD, karena percuma dan hanya membuang-buang waktu," ujar Frans.

Persoalan Sederhana

Ketua DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, kasus rekaman "Papa Minta Saham" telah menguras energi bangsa. Sebenarnya, kasus itu merupakan persoalan sederhana, yakni adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik.

"Tapi, kasus ini melebar tidak karuan, karena MKD telah mempertontonkan sidang etik yang malah mempermalukan DPR. Beberapa anggota MKD sengaja mengaburkan persoalan utama dengan mempersoalkan legalitas rekaman maupun *legal standing* pelaporan," ujarnya.

Pada, menurut dia, isi dan pelaku dalam rekaman tidak pernah membantah kebenarannya. Jadi, semestinya soal pelanggaran etik sudah jelas terjadi. Sedangkan, soal legalitas rekaman dan lainnya menjadi ranah penegak hukum. Bagi Teguh, tentu saja kasus itu telah mengganggu kinerja pemerintah dan parlemen. Di DPR, perhatian pimpinan tersita pada kasus itu, sehingga menyelenggarakan rapat Bamus saja sempat tertunda-tunda.

"Belum lagi soal psikologis menyangkut mulai menguatnya desakan agar SN mundur bahkan desakan kocok ulang pimpinan DPR. Di sisi

pemerintah, jelas. Presiden, Wapres, dan Menko Polhukam yang tersengat dengan kasus ini ikut meradang. Marah. Soliditas kabinet goyah, bahkan memperkuat kubukubuan akibat kasus ini," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendesak MKD untuk segera menuntaskan kasus "Papa Minta Saham". Berlarut-larutnya putusan MKD itu akan membuat masyarakat semakin apatis terhadap MKD dan DPR.

Menurut Ruhut, Novanto sudah jelas melanggar etika karena melakukan lobi-lobi ke Freeport dengan membawa pengusaha Riza Chalid. MKD juga tak bisa berkelit untuk meloloskan Novanto dengan pelanggaran etik DPR. "Kawan-kawan di MKD saya kira sudah tahu hal itu. Masyarakat juga sudah tahu. MKD tak perlu menunggu (buat putusan) terlalu lama," ujarnya.

Anggota DPR dari F-PKB Danil Johan juga mendesak MKD segera menyelesaikan dan memutuskan kasus rekaman Freeport itu. Saat ini, kinerja DPR terus terganggu, terutama di bidang legislasi. Dia juga berharap agar seluruh kekuatan dan energi bangsa bersatu untuk menuntaskan persoalan kontrak PT Freeport.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro menambahkan, keributan yang terjadi di MKD telah membuat banyak persoalan bangsa terbelengkalai. Secara sosial, masyarakat disuguhi informasi dan opini-opini yang semakin bias terkait kasus itu melalui media massa maupun media sosial. Imbasnya, masyarakat dengan cepat melupakan persoalan penting, seperti rapat Pansus Hak Angket Pelindo II, yang sebenarnya menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

[MJS/YUS/H-14/E-11/F-5]